

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan disahkannya UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang merupakan salah satu bagian mendasar dalam perubahan pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya penetapan kedua Undang-Undang tersebut merupakan jalan bagi pemerintah daerah dalam memiliki otoritas menangani daerahnya masing-masing. Dimana otoritas yang dimaksud diantaranya memberikan kesempatan di dalam aktivitas sumber dana, penentuan arah, tujuan dan target dalam menggunakan anggaran. Dimana dalam pengelolaan keuangan daerah pemerintah dituntut untuk semakin meningkatkan akuntabilitasnya juga tidak terkecuali dalam transparansinya terhadap masyarakat.

Transparansi sendiri dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana masyarakat dapat memahami dengan jelas terhadap segala hal kebijaksanaan dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan fungsinya beserta sumber daya yang digunakan, sedangkan untuk akuntabilitas merupakan suatu bentuk kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam suatu pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, transparansi sendiri menyediakan informasi keuangan yang transparan dan jujur terhadap masyarakat dengan dasar yang mempertimbangan bahwa masyarakat memiliki andil dalam mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam melakukan penanganan sumber daya yang dikelolanya dan kepatuhannya terhadap perundang-undangan adapun untuk akuntabilitas mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan (Fauziah, 2018).

Salah satu cara pemerintah dalam melakukan perwujudan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan melakukan penyampaian laporan

pertanggung jawaban yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti aturan Standar Akuntansi Pemerintah yang telah berlaku (Yani., 2014). Disisi lain cara untuk mewujudkan pemerintahan yang baik maka perlu adanya sebuah peningkatan sistem penyelenggaraan pemerintah dengan cara melakukan pemanfaatan kemajuan teknologi yang ada serta ilmu pengetahuan sehingga berguna dalam memberikan ketersediaan data dan informasi yang dapat dianalisis dan dimanfaatkan, adapun salah satu caranya dengan adanya pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun dengan bertujuan dalam menyediakan dan memberikan informasi yang relevan serta akurat tentang posisi keuangan serta seluruh transaksi yang diberlakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan, LKPD juga berfungsi di dalam membandingkan antara perwujudan antara pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai bagaimana kondisi keuangan dan efektivitas serta efisiensi pemerintah daerah juga mendukung dalam memastikannya ketaatannya terhadap peraturan perundang – undangan.

Dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan sesuai maka diatur Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Peraturan Menteri dalam Negeri (Mendagri) juga telah menerbitkan Peraturan No. 64 tahun 2013 yang membuat petunjuk tentang penerapan standar akuntansi berbasis akrual. Dimana dalam peraturan tersebut memuat tentang petunjuk dalam melakukan pengimplementasian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). SAKD merupakan perbaikan dari sistem pengelolaan keuangan daerah sebelumnya, dimana SAKD telah menggunakan menggunakan pencatatan double entry dengan sistem akuntansi berbasis kas modifikasian yang mengarah kepada basis akrual. Dengan penerapan SAKD diharapkan akan dapat mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah dapat menjadi lebih teliti, tepat dan komprehensif. Pembuatan laporan keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan Daerah sesungguhnya dapat menjadikan salah satu metode dalam menyelenggarakan pemerintah yang baik dengan

alasan terpenuhinya beberapa elemen yaitu akuntabilitas dan transparansi. Pertama akuntabilitas, dengan adanya standar yang telah ada, penjelasan efektifitas dan efisien APBN atau APBD menjadi bersifat dapat dipertanggung jawabkan. Kedua transparansi adanya tolak ukur tersebut akan menjadikan BPK (Badan Pengelolaan Keuangan) mudah dalam menemukan kecurangan yang terjadi.

Dalam penerapannya pemerintah daerah dibagi 2 bagian sistem antara lain Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dimana dua subsistem tersebut saling memiliki hubungan keuangan antara berbagai SKPD dan PPKD selaku BUD yang mana dapat memiliki hubungan selayaknya antara kantor pusat dan kantor cabang. PPKD sebagai kantor pusat dan SKPD sebagai kantor cabang untuk transaksi keuangan yang dilakukan PPKD dan SKPD tersebut dicatat oleh setiap SKPD kedalam akun Rekening Koran PPKD (RK-PPKD) dan sementara untuk PPKD akan mencatat transaksi hubungan keuangan dengan seluruh SKPD tersebut kedalam akun Rekening Koran SKPD (RK-SKPD). Maka dari kedua akun tersebut merupakan akun dimana yang menjelaskan tentang hubungan keuangan timbal balik (resiprokal) antara PPKD (selaku BUD) dan SKPD (selaku pengguna anggaran). Sementara itu sebagai satuan kerja PPKD juga berfungsi sebagai pengguna anggaran (disebut juga entitas akuntansi) seperti layaknya SKPD oleh karenanya PPKD juga menyelenggarakan akuntansi seperti SKPD dimana dalam membedakannya dengan SKPD biasanya PPKD menjalankan fungsinya juga sebagai entitas pelaporan. Dari hal tersebut maka dibuatlah laporan keuangan konsolidasian yang mana merupakan suatu laporan yang berisikan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan sehingga tersaji dalam satu entitas tunggal. Maka dapat disimpulkan PPKD dan SKPD memiliki keterkaitan satu sama lain dan ada pun laporan keuangan yang dihasilkan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang keuangan pemerintah pusat ataupun daerah dimana dengan itu dapat menunjukkan ketaatan terhadap APBN ataupun APBD dimana dalam LRA juga dapat memberikan gambaran perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dimana dalam PP 71 tahun 2010 ataupun Permendagri 64 tahun 2010 dijelaskan bahwasanya LRA secara umum disusun dan disajikan menggunakan basis kas. LRA yang disusun dalam laporan keuangan akan dijelaskan secara rinci dalam suatu catatan atas laporan keuangan yang mana penjelasan tersebut akan memuat informasi yang nantinya akan mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter dan juga menyebabkan terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya. Maka dengan hal itu LRA sendiri disusun dengan tujuan memberikan informasi yang berguna dalam memprediksikan sumber daya ekonomi yang akan diterima dalam periode mendatang yang akan digunakan dalam kegiatan pemerintahan serta dapat juga berisikan tentang indikasi bagaimana perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi yang telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan hemat yang sesuai dengan anggaran serta sesuai dengan undang – undang yang berlaku.

BPKPD sendiri merupakan salah satu entitas akuntansi yang juga memiliki fungsi sebagai entitas pelaporan pada kabupaten pamekasan dimana dengan adanya fungsi tersebut menjadikan BPKPD memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam melakukan penyusunan serta penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang mana menurut sumber BPK (BPK RI, n.d.) BPKPD dapat menghasilkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk LKPD Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang sesuai dengan aturan yang berlaku pada BPKPD yang dilihat sebagai entitas pelaporan yang memiliki tanggung jawab dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan judul “***Penerapan Standar Akuntansi***

Keuangan Daerah terhadap Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan”.

1.2 Topik Yang Dilaporkan pada Praktek Kerja Lapangan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka topik yang diangkat laporan pada praktek kerja lapangan yang akan diidentifikasi oleh penulis dalam penulisan tugas akhir yaitu Bagaimana penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pamekasan apakah telah sesuai dengan aturan SAKD.

1.3 Tujuan Pelaporan Praktek Kerja Lapangan

Tujuan dari pelaporan Praktek Kerja Lapangan ini adalah untuk mengetahui apakah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pamekasan telah melakukan pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD).

1.4 Kajian Literatur

1.4.1 Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

1.4.1.1 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Bastian (2010) menjelaskan bahwa sistem akuntansi adalah prinsip akuntansi yang menentukan kapan transaksi keuangan harus diakui untuk tujuan laporan keuangan. Sistem akuntansi sebuah metode dan tata cara dalam mencatat dan melaporkan informasi keuangan yang disediakan bagi perusahaan atau suatu organisasi bisnis (Mardiasmo, 2002). Penerapan sistem akuntansi pada perusahaan besar sangat sulit. Sulitnya pada sistem tersebut disebabkan oleh adanya sebuah hal yang khusus dari sistem yang dibuat untuk suatu organisasi bisnis sebagai akibat dari adanya perbedaan kebutuhan akan informasi oleh manajer, bentuk dan jalan transaksi laporan keuangan.

Akuntansi keuangan daerah dapat diartikan suatu cara dalam melakukan pengidentifikasian, pengukuran serta pelaporan transaksi keuangan dari suatu daerah

yang dijadikan sebagai acuan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak – pihak yang memerlukan (Halim, 2012), sementara menurut Peraturan Menteri (2006) pasal 232 menjelaskan sistem akuntansi pemerintah daerah sebuah proses yang dimulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dengan tujuan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan APBD yang dapat dijalankan secara manual ataupun secara komputerisasi

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan jika Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan sebuah sistem akuntansi yang didalamnya terdapat kebijakan ataupun umum dalam melakukan proses yang nantinya akan menghasilkan sebuah laporan yang akurat, relevan dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya yang mana nantinya digunakan dalam menghasilkan informasi dalam bentuk sebuah laporan pertanggung jawaban yang nantinya akan digunakan oleh pihak – pihak yang membutuhkan dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi.

Namun dalam penyusunannya menurut Bastian (2010) akuntansi pemerintahan perlu adanya dalam melakukan prinsip yaitu :

1. Prinsip kecepatan yaitu bahwa sistem akuntansi harus dapat menyediakan informasi yang diperlukan secara tepat waktu dan memenuhi kebutuhan sesuai dengan yang dibutuhkan
2. Prinsip keamanan dimana sistem akuntansi harus dapat membantu dalam menjaga keamanan harta milik organisasi.
3. Prinsip keekonomian hal ini berarti penyelenggaraan sistem akuntansi perlu mempertimbangkan antara biaya dengan manfaat yang diperolehnya.

1.4.1.2 Tujuan Akuntansi Pemerintah

Target dalam pemerintah sebagai salah satu bentuk organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi bisnis. Adapun pemerintah memiliki tujuan secara umum untuk memberikan kesejahteraan rakyat. Berkenaan dengan itu, akuntansi pemerintah memiliki tujuan berikut :

1. Akuntabilitas

Adapun berdasarkan pengertian akuntabilitas dimana merupakan sebuah pertanggung jawaban dalam pemberian informasi tentang bagaimana keberhasilan atau kegagalan yang telah dicapainya guna memberikan informasi bagi pihak – pihak yang terkait.

2. Manajerial

Tujuan manajerial sendiri disini memiliki maksud akuntansi pemerintah harus memberikan informasi keuangan yang diperlukan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengelolaan, pembuatan kebijakan serta pengambilan keputusan.

3. Pengawasan

Tujuan pengawasan bermaksud jika akuntansi pemerintah harus memungkinkan dalam proses diselenggarakannya pemeriksaan oleh aparat yang berwenang secara efektif dan efisien.

1.4.1.3 Entitas dalam Akuntansi Pemerintahan

Entitas akuntansi berdasarkan merupakan unit dalam pemerintahan sebagai pengguna anggaran dimana memiliki kewajiban dalam melakukan penyusunan laporan keuangan yang nantinya akan digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi sendiri mengarah pada sebuah entitas yang ditetapkan dengan tujuan akuntansi untuk aktivitas – aktivitas tertentu (Indonesia, 2010).

Adapun entitas pelaporan merupakan sebagai unit di dalam pemerintahan yang mana terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang mana menurut perundang undangan wajib dalam melakukan penyusunan laporan pertanggung jawaban dalam bentuk sebuah laporan keuangan. Entitas pelaporan lebih mengacu pada organisasi secara keseluruhan.

1.4.1.4 Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian dalam Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

A. Pengakuan akuntansi

Pengakuan akuntansi dalam SAP memberikan batasan – batasan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas, SAP sendiri ada bukan memberikan sebuah tekanan tersendiri akan tetapi memberikan kelonggaran untuk pemerintah daerah sendiri bagaimana merancang sistem akuntansi sesuai dengan karakteristik keuangan masing – masing daerahnya tersebut (Fauziah, 2018). Pengakuan sendiri merupakan sebuah proses dalam melakukan penetapan kapan suatu transaksi harus dicatat didalam jurnal, atas transaksi akuntansi pengakuannya dilakukan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :

a) Basis Kas (*Cash Basis*)

Basis kas adalah salah satu pengakuan dalam melakukan pencatatan akuntansi. Dimana pencatatanya diakui pada saat kas memang telah diterima atau masih akan adanya penerimaan uang ataupun biaya diakui pada saat kas benar-benar dikeluarkan.

b) Basis Akrua (*Accrual Basis*)

Basis akrual merupakan salah satu dasar di dalam melakukan pencatatan akuntansi.

c) Basis Kas Modifikasi (*Modified Accrual Basis*)

Basis ini dalam pencatatan transaksi menggunakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual

d) Basis Akrua Modifikasi (*Modified Accrual Basis*)

Basis ini dalam pencatatan transaksi memakai basis kas dalam sebagai transaksi dan separuhnya lagi menggunakan basis akrual.

B. Pengukuran Akuntansi

Pengertian pengukuran sendiri merupakan proses dalam menentukan penentuan nilai uang dalam mengakui dan memasukkan setiap akun ke dalam laporan keuangan. Biasanya pengukuran pada pos – pos dalam laporan keuangan berdasarkan atas nilai perolehan ataupun nilai historis adapun pengukuran sendiri juga memakai

mata uang rupiah dan untuk transaksi yang penggunaannya mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dengan mata uang rupiah (Fauziah, 2018).

C. Penyajian Akuntansi

Dalam penyajian berdasarkan Pangalila (2016) disajikan ikhtisar – ikhtisar atas metode dan proses di dalam pelaksanaan akuntansi kemudian dimasukan ke dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dan Laporan Realisasi Anggaran. Penyajian tersebut dilakukan oleh dinas ataupun instansi pemerintah dalam melakukan pembuatan laporan keuangan dimana setelah itu diserahkan kepada kepala daerah dan diaudit oleh BPK sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku (Yani., 2014).

1.4.1.5 Siklus Akuntansi Pemerintahan Daerah

Akuntansi sendiri sebuah sistem dimana yang menjadi sebuah satu kesatuan dengan memiliki tujuan, didalam sebuah sistem yang melakukan proses pengolahan masukan (input) yang biasanya berupa memasukan data – data ataupun informasi dalam bentuk dokumen dan menghasilkan keluaran (output) yang berupa sebuah laporan keuangan. Sebuah sistem dapat dijelaskan dengan sebuah siklus akuntansi yang mana siklus akuntansi berupa serangkaian proses yang dilakukan dengan memasukan data untuk dapat menghasilkan sebuah output (keluaran). Untuk siklus akuntansi pemerintah sebenarnya sama saja seperti halnya dengan akuntansi pemerintahan biasanya hanya saja nantinya yang akan membedakan adalah terdapat beberapa akun yang mana di akuntansi perusahaan tidak ada dan hanya terdapat pada akuntansi pemerintahan.

Siklus akuntansi dimulai dari tahap untuk menganalisa sebuah transaksi dengan tujuan mempermudah di dalam proses pengidentifikasian setiap jenis akun tersebut bukti transaksi dapat berupa surat ketetapan pajak / retribusi ataupun tanda bukti penerimaan. Tahap kedua adalah memasukan bukti transaksi tersebut kedalam jurnal secara kronologis dengan menggunakan metode double entry dimana setiap transaksi yang di jurnal akan dimasukan kedalam sisi debit ataupun sisi kredit Selanjutnya tahap ketiga dipindahkan ke dalam buku besar dengan mengurutkan sesuai nomor akun

biasanya tiap buku besar pemerintah daerah berisikan informasi nama SKPD, nama rekening, kode rekening, pagu APBD dan pagu perubahan APBD sebagai kontrol lalu. Tahap keempat dengan menyusun neraca saldo dengan memindahkan masing – masing akun yang ada di buku besar kedalam neraca tersebut.

Tahap kelima melakukan jurnal penyesuaian untuk akun – akun yang perlu disesuaikan seperti beban bayar dimuka, pendapatan diterima dimuka untuk pembuatannya biasanya terjadi di akhir ataupun bulan sesuai ketentuan masing – masing dengan tujuan agar pendapatan dicatat pada saat dihasilkan dan beban dicatat saat terjadinya. Tahap keenam dengan menyusun kembali neraca saldo setelah disesuaikan dengan tujuan untuk membuktikan kembali saldo total yang berada di debit ataupun di kredit yang berada di buku telah sesuai dengan seluruh jurnal penyesuaian yang telah dibuat. Tahap ketujuh penyusunan laporan keuangan, tahap ketujuh dengan membuat ayat jurnal penutup dan untuk tahapan terakhir adalah membuat neraca saldo setelah penutupan. Adapun pembuatan worksheet ini dapat bersifat opsional tergantung keinginan dan kebutuhan masing – masing.

1.4.1.6 Laporan Keuangan Akuntansi Sektor Publik

Laporan keuangan pada sektor publik merupakan hasil pada posisi keuangan dari transaksi – transaksi yang dibuat oleh suatu entitas pada pemerintahan. Tujuan adanya laporan keuangan merupakan bentuk dalam pemberian informasi mengenai posisi keuangan dan kemampuan kinerja dari suatu entitas yang berguna bagi sebagian orang yang membutuhkannya dimana berguna dalam melakukan mengevaluasi pengambilan keputusan mengenai pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan. Adapun laporan keuangan yang dihasilkan oleh sektor public :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

1.4.2 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Pada tahun 2010 diterbitkan lah PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti PP 24 tahun 2005 dengan tujuan dapat diikuti dengan aturan – aturan lainnya seperti permendagri lainnya di dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) ini terdapat 2 buah lampiran dimana lampiran I berisi tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual yang pelaksanaannya selambat – lambatnya dimulai pada tahun 2014 adapun untuk lampiran II berisikan tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis kas menuju akrual yang masa berlakunya hanya sampai dengan tahun 2014. SAP ada untuk digunakan sebagai acuan dalam pemerintahan untuk melakukan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Standar Akuntansi Pemerintah diperlukan dalam melakukan penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan atas APBD ataupun APBN. SAP sendiri dinyatakan dalam bentuk Penjelasan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta dilengkapi dengan Pengantar Akuntansi Pemerintahan dan penyusunannya menunjuk terhadap Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

1.4.2.1 Unsur Laporan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 komponen laporan keuangan pemerintah terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran sendiri menyajikan kebutuhan informasi yang memiliki fungsi dalam melakukan prediksi sumber daya ekonomi yang akan nantinya akan diterima dalam mendanai kegiatan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah dengan cara menyediakan laporan secara kompratif. Disisi lain LRA juga dapat berguna dalam menyajikan informasi untuk para pengguna laporan keuangan pemerintah tentang bagaimana data perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintahan sehingga dapat dievaluasi apakah suatu kegiatan telah dijalankan secara efisien dan efektif sesuai dengan anggaran

yang telah direncanakan. Adapun komponen pada LRA dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LRA adalah semua penghasilan yang terdapat pada rekening kas umum Negara / daerah
- b. Belanja adalah semua pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Umum Negara/ Daerah.
- c. Transfer adalah setiap perolehan atau pembiayaan pada entitas pelaporan dari ataupun terhadap entitas pelaporan lain.
- d. Pembiayaan adalah setiap penerimaan ataupun pengeluaran yang tidak mempengaruhi pada kekayaan bersih entitas yang wajib dibayar kembali atau akan diterima kembali.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih memberikan ringkasan atas penggunaan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah dengan penyajiannya secara komparatif dengan periode sebelumnya.

3. Neraca

Neraca berisikan gambaran posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Aset

Aset adalah segala sesuatu yang menjadi hak pemerintah yang ada karena disebabkan dari kejadian masa lampau ataupun dari yang masa akan datang, serta dapat diukur dalam satuan uang. Aset dibagi menjadi 2 bagian yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset dapat dikatakan sebagai aset lancar jika dapat dipakai ataupun digunakan dalam jangka waktu 1 tahun dan dapat berbentuk kas dan setara kas.

Yang dapat dikatakan aset lancar meliputi :

1) Kas dan setara kas

Kas merupakan uang tunai atau saldo simpanan yang terdapat di bank yang mana setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.

2) Investasi Jangka Pendek

Yang termasuk dalam bagian investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 sampai dengan 12 bulan dan surat berharga yang mudah diperjual belikan.

3) Piutang

Piutang merupakan kuasa pemerintah untuk dapat menerima pelunasan dari entitas lain adapun termasuk wajib pajak.

4) Persediaan

Persediaan merupakan bagian dari aset lancar dengan bentuk berupa barang ataupun perlengkapan dengan tujuan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah.

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Adapun untuk Aset tetap merupakan sebuah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik. Aset tetap terdiri dari : (1) Tanah, (2) Bangunan, (3) Jaringan, (4) Bangunan dari gedung, (4) Mesin dan peralatan, (7) Kendaraan, (8) Mebel dan perlengkapan.

b. Kewajiban

Kewajiban pemerintahan biasanya merupakan kewajiban yang ada disebabkan adanya kejadian masa lalu yang dibayarkannya menimbulkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dikelompokkan dalam dua golongan :

1) Kewajiban jangka pendek.

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang pembayarannya dilaksanakan dengan waktu kurang dari 1 tahun.

2) Kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka panjang merupakan kelompok kewajiban yang pembayarannya dilakukan dapat lebih dari 1 tahun.

c. Ekuitas

Ekuitas adalah keseluruhan total harta bersih yang dimiliki oleh pemerintah yang menggambarkan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan kebutuhan informasi mengenai segala aktivitas operasional keuangan terhadap entitas pelaporan yang beracuan pada pendapatan LO, beban, dan surplus/defisit operasional yang penyajiannya dilakukan dengan membandingkan dengan periode sebelumnya. Adapun komponen yang terdapat pada Laporan Operasional dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO merupakan wewenang pemerintah yang mana diakui dalam penambahan nilai modal bersih.
- b. Beban merupakan tanggungan pemerintah yang mana pengakuannya diakui sebagai pengurang nilai modal bersih.
- c. Transfer merupakan hak dalam penerimaan atau tanggungan pengeluaran uang dari ataupun oleh suatu entitas pelaporan dari ataupun kepada entitas pelaporan lain

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas dalam penyajiannya memberikan informasi tentang sumber, penggunaan, serta perubahan kas dan setara kas selama periode tersebut, informasi tersebut memberikan arahan untuk jumlah arus kas dimasa depan dan berguna dalam mengevaluasi kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Adapun aktivitas yang mencakup dalam Laporan Arus Kas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Aktivitas operasi merupakan aktivitas yang berasal dari penerimaan serta pengeluaran kas yang digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan.
- b. Aktivitas investasi merupakan aktivitas yang berasal dari aktivitas investasi baik itu berupa pemasukan ataupun pengeluaran.
- c. Aktivitas pendanaan merupakan aktivitas yang didapat dari melakukan pembiayaan/pendanaan.
- d. Aktivitas transitoris merupakan aktivitas penerimaan ataupun pengeluaran kas selain dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas memberikan penyajian sekurang-kurangnya informasi tentang pos-pos ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, surplus/defisit LO serta koreksi yang mempengaruhi ekuitas yang antara lain biasanya diakibatkan dari hasil kumulatif.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

CALK dibuat dengan tujuan agar informasi pada laporan keuangan pemerintah dapat dimengerti oleh pengguna dalam melakukan pengkajian serta penilaian pertanggung jawaban keuangan, selain itu CALK sendiri memberikan penjelasan dari semua laporan keuangan dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah dan dapat dipahami oleh lebih banyak pengguna laporan keuangan pemerintah tak terkecuali masyarakat umum.

1.5 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

1. Memenuhi syarat kelulusan pada pemrograman studi Diploma III – Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura
2. Membandingkan teori yang sudah di peroleh selama masak kuliah dengan kejadian dalam pemerintahan
3. Mengetahui kegiatan yang di lapangan atas suatu masalah yang berhubungan langsung dengan Akuntansi Keuangan Daerah

1.6 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Dengan terlaksananya Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak yang terkait, yaitu :

1. Bagi mahasiswa pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
 - a. Dapat memenuhi tugas mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebagai syarat wajib kelulusan mahasiswa Diploma III Universitas Trunojoyo Madura
 - b. Mengetahui secara langsung apa saja kendala dan permasalahan akuntansi yang terjadi serta mencari tahu bagaimana solusi penyelesaian yang harus dilaksanakan
 - c. Mengetahui secara langsung apa saja kendala dan permasalahan akuntansi yang terjadi serta mencari tahu bagaimana solusi penyelesaian yang harus dilaksanakan
 - d. Memperoleh pengalaman kerja dan mengetahui bagaimana penerapan akuntansi di **Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pamekasan**
2. Bagi Jurusan D-III Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura
 - a. Sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana program atau kurikulum yang telah diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna lulusannya
 - b. Sebagai pengenalan Pendidikan Program Diploma III Akuntansi pada perusahaan atau instansi yang membutuhkan tenaga kerja yang dihasilkan oleh program Diploma III Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura
3. Bagi Badan Keuangan Daerah
 - a. Sebagai sarana media untuk meningkatkan kerjasama antar Badan Keuangan Daerah dengan Perguruan Tinggi khususnya Program Diploma III Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura

[illegible]

[illegible]

[illegible]

pengumpulan data yang menjadi langkah strategis untuk penyusunan tugas akhir ini.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan kegiatan dengan suatu kondisi yang ada.

1.8.2.1 Sumber Data

Sumber data merupakan bagian yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam melakukan penyusunan tugas akhir ini, karena sumber data merupakan sumber dimana informasi yang didapat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk dijadikan sebagai data yang akan dibahas oleh penulis dalam isi pembahasan penyusunan tugas akhir ini, untuk mendapatkannya penulis memerlukan teknik pengumpulan data yang menjadi langkah strategis untuk penyusunan tugas akhir ini.

1. Data Primer

Data primer, Waluyo (2010) berpendapat data primer merupakan fakta yang diperoleh langsung melalui penelitian. Data primer yang diperoleh yaitu dengan melakukan wawancara langsung dan dokumentasi terhadap objek observasi. Wawancara ini dilakukan kepada bagian internal BPKPD khususnya bagian Akuntansi dan Pelaporan sebagai penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah merupakan data yang diperoleh dari media informan seperti buku, undang-undang, dokumen, catatan atau bukti historis yang telah terarsip. Data sekunder merupakan kebenaran yang diperoleh secara tidak langsung (Waluyo : 2010). Adapun data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah : Struktur Organisasi dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.

1.8.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara tepat dan logis yang dilakukan untuk mengungkap informasi dan fenomena sesuai dengan cangkupan yang terjadi di lapangan. Maka teknik pengumpulan data dilakukan sesuai dengan cangkupan secara kualitatif yaitu melakukan beberapa teknik yaitu teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi

a Metode Wawancara

Menurut Bungin (2001) wawancara adalah proses dengan tujuan untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai.

Dalam pelaksanaan pengumpulan data di lapangan ini menggunakan cara mewawancarai secara langsung dan mendalam (in depth interview) kepada pihak yang terlibat dan terikat langsung untuk mendapatkan penjelasan pada keadaan yang sebenarnya.

Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara ini dilakukan kepada bagian internal BPKPD khususnya bagian Akuntansi dan Pelaporan sebagai penyusun Laporan Keuangan Daerah yaitu Ibu Uci selaku Kabid Akuntansi dan Pelaporan dan Ibu Fitri selaku Kasubid Akuntansi dan Pelaporan

b Metode Observasi

Observasi adalah proses untuk memperoleh data dari tangan pertama dengan melakukan mengamati orang dan tempat pada saat melakukan penelitian. Observasi dilakukan berupa Praktek Kerja Lapang (PKL) selama 30 hari kerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pamekasan yaitu sebagai Akuntan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara dalam pengumpulan data dengan cara mempelajari catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang tersimpan baik itu berupa laporan keuangan dan lain-lain sebagainya. Menurut sugiyono (2013) dokumen merupakan rentetan kejadian yang telah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya dokumental dari seseorang. Adapun untuk dokumentasi berupa dokumentasi hasil Jurnal pada aplikasi SIMKEUDA.